

**PENERAPAN SIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, KOMPETENSI SDM
PADA KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMDA DI KABUPATEN GROBOGAN**

***IMPLEMENTATION OF AIS, INTERNAL CONTROL SYSTEM, HR COMPETENCE ON
THE QUALITY OF LOCAL GOVERNMENT FINANCIAL REPORTS IN GROBOGAN
DISTRICT***

Yunita Budi Alifya Miranti¹, Hwihanus²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jalan Semolowaru No 45 Surabaya, Jawa Timur

Email: 1222100148@surel.untag-sby.ac.id¹, hwihanus@untag-sby.ac.id²

Article History:

Received: 19 Oktober 2022

Revised: 20 November 2022

Accepted: 31 Desember 2022

Keywords: *Application of SIA,
SPI, HR, Local Government
FS.*

Abstract *This study tries to find out the application of the Accounting Information System (AIS), internal control system (SPI), and competence of Human Resources (HR) on the quality of local government financial reports (FS). Both agency theory and compliance theory are used in this study. As the relationship between society as the main actor and the government is explained by agency theory. According to the compliance hypothesis, every institution is obliged to follow the rules because the legislature has the right to regulate behavior. The population of this study are employees of the financial department of a local government organization in Grobogan district, Central Java. There are 106 respondents in the entire research sample. Primary data from distributing questionnaires to respondents is used. However, the internal control system and AIS have no impact on the quality of the FS. The consequences of this study highlight how important it is to improve local government human resource skills.*

Abstrak

Penelitian ini mencoba untuk mencari tahu penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA), system pengendalian internal (SPI), dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) pada kualitas laporan keuangan (FS) Pemda. Baik teori agensi maupun teori kepatuhan digunakan dalam penelitian ini. Sebagai hubungan antara masyarakat sebagai pelaku utama dan pemerintah dijelaskan oleh teori keagenan. Menurut hipotesis kepatuhan, setiap lembaga wajib mengikuti aturan karena legislatif memiliki hak untuk mengatur perilaku. Populasi penelitian ini yaitu karyawan bagian keuangan sebuah organisasi Pemda di kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Ada 106 responden dalam keseluruhan sampel penelitian. Data primer dari penyebaran kuesioner kepada responden digunakan. Akan tetapi, sistem pengendalian internal dan SIA tidak berdampak pada kualitas FS. Konsekuensi dari penelitian ini menyoroti betapa pentingnya meningkatkan keterampilan sumber daya manusia pemerintah daerah.

Kata Kunci: Penerapan SIA, SPI, SDM, FS Pemda.

LATAR BELAKANG

Inti permasalahan sesuai penyelidikan ini adalah tidak ada masyarakat pemda di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, yang kualitas laporan keuangannya tidak wajar tanpa kecuali atau kualitas laporan keuangannya sangat baik, padahal modern. masyarakat menuntut tata kelola yang baik. Pentingnya akuntabilitas publik telah menjadi perhatian pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah. Akuntabilitas sangat mudah untuk mentransfer data administrasi publik dan bisa juga menjaga untuk mengelola keuangan pemerintah pusat dan daerah (Saleh, et al., 2020; Evicayani & Setiawina, 2016). Pemerintah pusat dan daerah wajib menerbitkan pelaporan keuangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan (Mahaputra & Putra, 2014). Relevansi, komparabilitas, dependabilitas, dan pemahaman merupakan persyaratan pelaporan keuangan untuk menghasilkan laporan yang berkualitas (Tawakal & Suparno, 2017).

Pengelolaan keuangan pemda Nomor 12 Tahun 2019 meliputi semua tugas yang berkaitan dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pemantauan kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan pemda berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 (selanjutnya disingkat LKPD). Ketujuh komponen tersebut meliputi neraca, laporan operasi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan anggaran, laporan selisih anggaran yang dimodifikasi, dan catatan atas laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan yang juga dikenal dengan SAP yang merupakan pedoman bagi badan hukum dengan tujuan untuk menciptakan informasi yang signifikan tentang laporan keuangan pemerintah di Indonesia harus dalam penyusunan laporan keuangan (Mahaputra & Putra, 2014). Tujuannya adalah memberikan informasi data tentang posisi keuangan lembaga pelapor untuk mengambil keputusan.

Teori keagenan dan teori kepatuhan keduanya digunakan dalam penelitian ini untuk hubungan antara masyarakat yang akan menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah sebagai agen. Pemerintah, untuk memastikan akuntabilitas, menyediakan, melaporkan, dan menjelaskan semua kegiatan dan yang telah menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat (Shintia & Erawati, 2017). Teori kepatuhan berkaitan dengan bagaimana bersosialisasi untuk mempengaruhi perilaku patuh orang atau individu. Kepatuhan lembaga pelapor menyajikan pernyataan pertanggungjawaban dalam bentuk laporan keuangan adalah penting untuk melaksanakan kepatuhan terhadap penyajian informasi di laporan keuangan berdasarkan SAP (Shintia & Erawati, 2017).

Kesiapan SIA untuk memberikan informasi berupa data yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal di suatu instansi atau lembaga merupakan salah satu faktor penunjang kualitas laporan keuangan. Subsistem atau komponen organisasi yang disebut SIA memiliki tanggung jawab untuk menawarkan data keuangan untuk membantu manajemen dalam menentukan pilihan (Tawakal & Suparno, 2017).

Pengendalian internal adalah aspek lain yang berkontribusi terhadap keuangan yang luar biasa. Dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi melalui proses yang berusaha membangun kepercayaan laporan keuangan, pengendalian internal ini sangat membantu dalam mendukung sikap yang benar (Hardiningsih, et al., 2020). Efektivitas pengendalian internal organisasi menentukan seberapa baik laporan keuangannya, oleh karena itu sangat penting (Bahtiar, 2013).

Integritas keuangan sebagian besar merupakan hasil dari kemampuan sumber daya manusia (SDM) dapat mengelola laporan keuangan. Kemampuan SDM yang melakukan tugas dan kewajiban melalui pelatihan, sumber daya, pendidikan, dan pengalaman yang kompeten dikenal sebagai kompetensi SDM. Namun temuan penyelidikan ini berbeda dengan temuan Wardani & Andriyani (2017) mengklaim bahwa implementasi SIA keuangan daerah tidak memiliki dampak yang berarti pada kualitas laporan keuangan dari pemda. Hasil penelitian ini, bagaimanapun, bertentangan dengan pernyataan Yendrawati (2013) bahwa pengendalian internal tidak berpengaruh pada keakuratan laporan keuangan.

Namun penyelidikan ini tidak mendukung penelitian Husna (2013) bahwa nilai informasi pelaporan keuangan pmda secara signifikan dipengaruhi oleh SDM. Kajian tersebut termasuk penting karena perbedaan hasil penyelidikan dan fenomena yang digariskannya. Organisasi pemerintah daerah Kabupaten Grobogan yang akan diberlakukan pada tahun 2020 menjadi bahan kajian ini. Oleh karena itu, topik penelitiannya adalah apakah laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan berkualitas tergantung pada implementasi SIA, mekanisme pengendalian intern, dan keterampilan sumber daya manusia.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan menjelaskan tentang hubungan kontraktual antara masyarakat dan agen (manajer bisnis) (pemilik perusahaan). Hubungan antara masyarakat dan agen dijelaskan dengan pendekatan ini. Masyarakat (principal) yang merupakan penerima amanah berhak menuntut pertanggungjawaban kepada pemerintah (agent) yang merupakan pihak yang memegang amanat rakyat dan wajib memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan pengungkapan semua kegiatan. Menurut teori keagenan, implementasi melibatkan kebutuhan yang sangat beragam untuk prinsipal dan agen, yang dapat menyebabkan konflik kepentingan atau masalah keagenan lainnya. Pentingnya untuk mengawasi apa yang dilakukan primer terhadap agen untuk menyembunyikan masalah. Jika ada pengeluaran instansi, laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk melacak upaya pencegahan (Shintia & Erawati, 2017).

Desain berdasarkan teori keagenan adalah masalah dengan prosedur keagenan dan keuangan untuk organisasi sektor publik. Interaksi antara pemerintah dengan masing-masing pengguna informasi keuangan menjadi gambaran hubungan keagenan dalam pemerintahan yang demokratis.

2. Teori Kepatuhan

Menurut teori kepatuhan (juga dikenal sebagai normatif melalui legitimasi atau komitmen normatif melalui legitimasi), setiap organisasi memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan. Sutinen dan Kuperan (1999) menegaskan bahwa terdapat berbagai sudut pandang ekonomi pada teori kepatuhan. Menurut sudut pandang neoklasik, sulit untuk memaksimalkan profitabilitas bisnis karena peraturan bisnis saat ini. Ilmu-ilmu sosial telah menyelidiki teori kepatuhan.

Pendekatan normatif dan pendekatan instrumental membentuk dua divisi teori kepatuhan. Pendekatan normatif adalah salah satu yang berkaitan dengan moral dan konflik dengan kepentingan pribadi, sedangkan pendekatan instrumental adalah salah satu yang mendorong kepentingan pribadi dan reaksi pada perubahan insentif. Penerapan teori kepatuhan dalam akuntansi harus didasarkan pada pendekatan normatif.

Proses sosialisasi memiliki pengaruh yang kuat terhadap kemampuan individu untuk patuh, menurut teori kepatuhan. Teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan fitur-fitur akuntansi jika dilihat dari sudut pandang normatif dalam teori kepatuhan. Penyajian laporan informasi keuangan berbasis SAP akan memastikan kepatuhan lembaga terhadap kewajibannya yang terpenuhi (Shintia & Erawati, 2017).

Pengembangan Hipotesis

A. Pengaruh Penerapan SIA pada Kualitas FS (Laporan Keuangan).

Istilah "SIA" (Sistem Informasi Akuntansi) mengacu pada sekelompok SDM dan aset fisik yang mengatur komunikasi data dalam bentuk keuangan dan data lainnya. Para pengambil keputusan kemudian diberi data keuangan untuk didiskusikan. SIA melakukan proses dengan menggunakan sistem manual atau dengan menggunakan komputer (Bodnar & Hopwood, 2004). Sebuah SIA adalah sistem yang menyusun data dan transaksi secara berurutan untuk memberikan informasi yang berguna dalam desain, pengawasan dan pengoperasian suatu bisnis (Tawakal & Suparno, 2017). Dengan kata lain, FS di suatu instansi akan lebih berkualitas jika SIA-nya lebih kuat. Sesuai dengan Ha (2020) yang mengklaim bahwa faktor sistem informasi memiliki dampak yang baik terhadap kinerja operasional, kinerja operasional akan meningkat lebih cepat jika faktor SIA membaik.

Menurut teori kepatuhan, ada hubungan antara efektivitas FS pemerintah daerah dengan penggunaan sistem informasi, dan dalam praktiknya, personel sistem informasi harus mematuhi aturan untuk mencegah pelanggaran dalam penggunaan sistem informasi. Studi yang diselidiki oleh Astrawan et al. (2016), menemukan bahwa SIA secara signifikan mempengaruhi seberapa cepat pemerintah daerah mempublikasikan data keuangannya. Akibatnya, hipotesis penelitian pertama.

B. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas FS (Laporan Keuangan).

Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses sangat penting bagi tindakan atau operasi yang dilakukan para manajer dan staf dalam rangka menumbuhkan kepercayaan yang cukup bagi tercapainya tujuan sesuai operasi keuangan yang handal. Pengendalian internal merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi kinerja keuangan penda. Karena sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang sering mengalami kendala baik sengaja maupun tidak sengaja maka diperlukan pengendalian intern (Husna et al., 2017). Jika sistem pengendalian internal efektif, prosedur akuntansi dapat dengan mudah dikelola, dipantau, dan ditemukan jika terjadi kecurangan, memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi tujuannya dan tersedianya data keuangan yang berkualitas dan dapat dipercaya (Yendrawati, 2013). Akibatnya, hipotesis penelitian kedua.

C. Pengaruh Kompetensi SDM pada Kualitas FS (Laporan Keuangan).

Kompetensi SDM adalah pengetahuan SDM yang berguna untuk menyelesaikan tugas dan menegakkan komitmen yang ditugaskan kepada mereka yang memiliki pelatihan, pendidikan, dan pengalaman yang sesuai. Penyajian laporan keuangan juga dapat dipengaruhi oleh anggota staf yang tidak sepenuhnya menyadari tanggung jawab dan perannya, serta masalah yang muncul selama proses pengumpulan data (Mutiana et al., 2017). Akibatnya, hipotesis ketiga penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Populasi penyelidikan ini adalah pegawai instansi pemda di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia yang bekerja di bagian keuangan. Pemilihan dari objek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Grobogan merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Tengah Jawa, Indonesia yang mampu memperoleh Unqualified Opini (WTP) untuk laporan keuangannya dalam empat tahun berturut-turut, dan pemilihan instansi di Kabupaten Grobogan dilakukan berdasarkan dua alasan: Pertama, organisasi adalah satuan kerja perangkat daerah, berimplikasi pada penyelenggaraan, pembuatan, dan pelaporan laporan keuangan pemerintah. Kedua, mereka adalah beberapa pelanggan laporan keuangan.

Dalam penyelidikan ini sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan menggunakan pendekatan purposive sampling. Akibatnya, ini dikenal sebagai sampling penilaian. Standar ini digunakan untuk memilih sampel ini: 1) Pegawai berstatus PNS dan yang tidak berstatus PNS, 2) berperan menyiapkan laporan keuangan di instansi, 3) lama kerja minimal 1 (satu) tahun.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang secara fisik ada pada saat subjek penelitian dipelajari dan langsung relevan dengannya. Skala Likert 5 poin dilakukan melalui pengukuran kuesioner penelitian ini. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia menggunakan kuesioner yang langsung diserahkan kepada responden yang merupakan pegawai dan personalia di bagian akuntansi atau keuangan. Kuesioner dikembalikan ke institusi setelah diisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Organisasi pemerintahan Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah, Indonesia dijadikan sebagai subjek penelitian. Dua puluh dari 29 dinas dan instansi yang tergabung dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Grobogan menjadi subjek penelitian. Berdasarkan kriteria yaitu petugas OPD Kabupaten Grobogan yang bekerja di bagian akuntansi atau bagian keuangan maka digunakan pendekatan judgment sampling untuk memilih sampel.

Setiap kantor memiliki sekitar enam orang, termasuk personel di bidang akuntansi atau keuangan, berdasarkan pengamatan dan diskusi dengan sejumlah responden. Setelah itu, peneliti membagikan 115 kuesioner. Enam responden tidak mengembalikan kuesioner, meninggalkan tiga dengan jawaban tidak lengkap, dengan total 106 kuesioner selesai. Temuan menunjukkan bahwa 34% responden berusia antara 41 dan 50 tahun. Menurut pendapat karyawan dan staf wanita di sektor keuangan, lebih dari 63,2% tenaga kerja terdiri dari pria, 75,5% telah memasuki layanan pemerintah, 36,8% tenaga kerja telah bekerja selama lebih dari 15 tahun.

Sejauh mana variabel dependen dapat menjelaskan variabel independen diperiksa dengan menggunakan uji koefisien determinan praktis (R^2). Lihat ringkasan temuan dalam kolom Adjusted R Square model tabel untuk mempelajari hasil uji koefisien determinan (R^2).

Menurut temuan, nilai Adjusted R Square sesuai ringkasan adalah 0,085, atau 8,5%. Kesimpulan: Semua faktor independen sebesar 8,5% dapat menjelaskan kualitas akun keuangan yang bervariasi. Sedangkan faktor lain yang tidak diperhatikan dapat menjelaskan sisanya sebesar 91,5. Jika signifikansi kurang dari 0,05, hasil uji f dari tabel ANOVA dapat diperiksa. Bersamaan, faktor-faktor independen mempengaruhi variabel dependen.

a. Pengaruh Penerapan SIA pada Kualitas FS (Laporan Keuangan) Pemda

Tingkat signifikansi variabel SIA sebesar 0,058, yang menunjukkan bahwa implementasi SIA pemda tidak berpengaruh pada akurasi laporan keuangan Pemda Kabupaten Grobogan. Akibatnya, hipotesis pertama, yang menurutnya penggunaan SIA berdampak pada keakuratan pelaporan keuangan, dibantah.

Temuan tidak mendukung teori kepatuhan, yang berpendapat bahwa untuk menggunakan SIA dengan baik Rata-rata tingkat pencapaian responden terhadap implementasi variabel SIA memiliki tingkat pencapaian di atas rata-rata sebesar 49% dan memiliki nilai dibawah rata-rata sebesar 51%, sesuai hasil tanggapan mereka terhadap variabel implementasi informasi akuntansi keuangan daerah. Meskipun terlihat baik di mata OPD, entitas pemerintah daerah belum mampu sepenuhnya menunjukkan kapasitasnya untuk melaksanakan SIA dengan benar.

Terlihat dari tanggapan responden dengan skor rata-rata terendah bahwa OPD Kabupaten Grobogan belum mengkategorikan secara tepat semua transaksi yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum efektif menggunakan APBD SIA. Kualitas laporan keuangan OPD Kabupaten Grobogan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), padahal implementasi SIA di OPD belum terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan pemda Kabupaten Grobogan dari pemerintah memiliki kualitas yang baik. Dapat dikatakan bahwa kualitas pelaporan keuangan di OPD Kabupaten Grobogan tidak terpengaruh oleh penerapan SIA.

b. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal pada Kualitas FS (Laporan Keuangan) Pemda

Temuan penyelidikan ini memperlihatkan bahwa sistem pengendalian internal tidak ada hubungannya dengan laporan keuangan Pemda Kabupaten Grobogan. Hipotesis kedua, yang menurutnya sistem pengendalian internal mempengaruhi keakuratan akun keuangan, dengan demikian dibantah. Teori kepatuhan menyatakan bahwa ketika membangun sistem pengendalian internal, personel harus mematuhi standar saat ini untuk mencegah pelanggaran, namun temuan penelitian bertentangan dengan gagasan ini.

Meskipun tampaknya OPD telah menerapkan sistem pengendalian internal dengan baik, namun mereka belum melakukannya dengan sebaik-baiknya, terlepas dari persepsi publik. Namun, OPD belum dapat menunjukkan bahwa mereka tidak sepenuhnya mampu melakukannya. Hal ini memperlihatkan betapa buruknya penerapan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan. BPK memberikan opini tegas kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan tentang kualitas laporannya, menunjukkan kualitasnya tinggi meskipun sistem pengendalian intern OPD telah dibuat tetapi belum diterapkan dengan baik.

c. Pengaruh Kompetensi SDM pada Kualitas FS (Laporan Keuangan) Pemda

Berdasarkan data yang disajikan pada pernyataan di atas, nilai signifikansi variabel kompetensi SDM berpengaruh pada akurasi pelaporan keuangan Pemda. Oleh karena itu premis ketiga menegaskan yang diterima tanggapan penerapan sistem pengendalian internal responden pada setiap kelompok yang baik.

Antara prinsipal dan agen, hubungan keagenan melayani fungsi yang berbeda. Dengan menggunakan pernyataan yang dibuat oleh agen pemerintah atau pegawai layanan, mereka yang memiliki kekuasaan untuk menetapkan peraturan berharap dapat didorong oleh tata kelola yang baik di antara kepala sekolah. Sebagai karyawan yang mematuhi aturan, agen ingin diberi kompensasi atas upaya mereka. SDM di OPD Kabupaten Grobogan berkualitas atau kompeten dalam sumber daya untuk menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kualitas laporan keuangan pada Pemda Kabupaten Grobogan dipengaruhi oleh kompetensi SDM, sesuai dengan temuan analisis data dan pengujian hipotesis. Namun demikian, laporan keuangan Pemkab Grobogan tetap berkualitas tinggi terlepas dari penerapan SIA dan sistem pengendalian internal. Kelemahan utama studi yaitu nilai R kuadrat yang disesuaikan lebih rendah sebesar 8,5%. Oleh karena itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menyesuaikan model dan variabel lain untuk lebih mendukung temuan. Kesimpulan studi ini menekankan pentingnya laporan keuangan pemerintah yang berkualitas tinggi karena harus dipublikasikan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

DAFTAR REFERENSI

- Astrawan, K.P., Wahyuni, M.A., dan Herawati, N.T. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi, Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Intern, dan Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Temporalitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di SKPD Kabupaten Buleleng Universitas Pendidikan Ganesha SI AK E-Journal, 6(3), 1–13.
- Evitayani, S.I., dan Setiawina, S.E. (2016). Analisis Unsur-unsur yang Mempengaruhi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tabanan. E-Journal Ekonomi & Bisnis Universitas Udayana 5(3), 403-428.
- Ha, V.D. (2020). Dampak Budaya Organisasi terhadap Sistem Informasi Akuntansi dan Kinerja Operasional Usaha Kecil dan Menengah di Kota Ho Chi Minh Jurnal Keuangan Asia, Ekonomi dan Bisnis, 7(2), 301–308. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no2.301>
- Hardiningsih, P., Udin, G. N., dan Srimindarti, C. (2020). Apakah Akuntabilitas Bergantung pada Kompetensi, Komitmen, dan Pengendalian Internal? 7(4), 223-233, Jurnal Keuangan Asia, Ekonomi dan Bisnis. Jafeb.2020.vol7.no4.223, <https://doi.org/10.13106>
- Herawati, H (2014). Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal SIKAP, 11(1), 49.
- F. Husna (2013). Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah: Dampak Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengendalian Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal. Jurnal Akuntansi, 1(2), 1–20
- N. Husna, M. Rasyidin, & A. Zairinah (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. 107–114 dalam Jurnal Akuntansi dan Pengembangan, 3(2).
- Jensen, M.C., dan Meckling, W.H. (1976). Teori Perusahaan: Struktur Kepemilikan, Biaya Keagenan, dan Perilaku Manajerial. Jurnal Ekonomi Keuangan, 3, 305–360
- Juwita, R. (2013). Dampak penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem informasi akuntansi terhadap keakuratan laporan keuangan. Trikonomika, 12(2), hlm. 201-214.